

4. Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Bencana Alam Internasional.
5. Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah faktor kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
6. Upaya-upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional dan internasional.
7. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan pola pembangunan yang difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.
8. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana, dan hal ini sebaiknya dilaksanakan secara bebas dan tepat waktu sebagai bagian dari kerjasama teknik.
9. Perlindungan lingkungan merupakan salah satu komponen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan upaya yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana alam.
10. Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dan aset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. masyarakat internasional harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengerahkan sumberdaya yang ada secara optimal dan efisien termasuk dalam hal pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

3. Kerjasama yang sistematis dalam pengurangan risiko bencana, pelaksanaan kesiapsiagaan darurat dan program pemulihan dalam rangka rekonstruksi bagi masyarakat terkena dampak bencana.

Substansi dasar yang selanjutnya merupakan prioritas kegiatan untuk tahun 2005-2015 antara lain:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Tindak lanjut dari kerangka Aksi Hyogo ini telah dilakukan di beberapa negara dan kawasan diantaranya dikawasan negara-negara Kepulauan Pasifik yang telah menetapkan *Framework for Action 2005-2015: An Investment for Sustainable Development in Pacific Island Countries*; Kawasan Afrika membentuk *Africa Advisory Group on Disaster Risk reduction* dan menetapkan *African Regional Platform of National Platform for Disaster Risk Reduction*; dan di kawasan Asia telah disepakati dokumen *Beijing Declaration on the 2005 World Conference on Disaster Reduction*. Pada lingkup negara-negara ASEAN

pondasi rasa aman yang segala kegiatannya mendorong untuk kecukupan kebutuhan dasar serta membangun berbagai perangkat dan kegiatan untuk pengurangan risiko bencana. Dibentuk sebagai proses yang berkelanjutan sebagai bagian dari proses pembangunan.²¹ Pelaksanaan PRBBK di Indonesia dalam gambaran besarnya masih mencari bentuk di masing-masing konteks lokal. Berbagai inisiatif membangun, ‘desa tangguh’, ‘desa siaga’, ‘desa kenyal bencana’, ‘desa model PRBBK’, ‘mukim daulat bencana’, hingga rentetan penamaan lainnya yang berbeda-beda, masih dalam taraf proyek percontohan dari berbagai versi organisasi nonpemerintah maupun pemerintah dan donor. Semuanya masih dalam tahap mencari bentuk yang terbaik.²²

Masyarakat lokal dengan ancaman bencana bukanlah pihak yang tidak berdaya, apabila agenda pengurangan risiko bencana bukan lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitas lokal serta prioritas yang dimiliki oleh komunitas maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan. Namun, seringkali pemerintah cenderung menerapkan pendekatan “atas ke bawah (*top down*)” dalam perencanaan manajemen bencana dimana kelompok sasaran diberi solusi yang dirancang untuk mereka oleh para perencana dan bukannya dipilih oleh masyarakat sendiri. Pendekatan seperti itu cenderung mendekatkan tindakan-tindakan manajemen

²¹ United Nations Development Programme and Government of Indonesia. *panduan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas*. Tahun 2012 hal. 18

²² Jonatan Lassa dkk, “*Kiat Tepat Mengurangi Resiko Bencana Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*”, hal 4

bertanggung jawab untuk semua tahapan program termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Pada akhirnya, ujung dari partisipasi komunitas dalam penanggulangan bencana adalah penanggulangan bencana oleh komunitas itu sendiri. Pengalaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas akan merujuk pada: (1) melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas mampu mengelola risiko bencana secara mandiri, (2) menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar, (3) penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk keberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana, (4) pendekatan multisektor, multi disiplin, dan multi budaya.²⁵

Ada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan aktor dalam proses pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. *Stakeholder* pengelolaan bencana secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) penerima manfaat, komunitas yang mendapat manfaat/dampak secara langsung maupun tidak langsung, (2) intermediari, kelompok komunitas, lembaga, atau perseorangan yang dapat memberikan pertimbangan atau fasilitasi dalam pengelolaan bencana antara lain: konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang kebencanaan, dan (3) pembuat kebijakan, lembaga/institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum seperti lembaga pemerintahan dan dewan kebencanaan. Penentuan dan

²⁵United Nations Development Programme and Government of Indonesia. *panduan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas*. Tahun 2012 hal. 22

Salah satu isu kunci yang menjadi *concern* dari proses mentoring dalam peredaman risiko bencana ini adalah memastikan bahwa analisis gender menjadi perspektif yang terintegrasi di dalamnya. Beberapa alasan yang mendasari mengapa mengapa integrasi perspektif ini begitu penting, akan dielaborasi dalam analisis kerentanan, analisis dampak, relasi antar pihak dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk membuat upaya antisipasi bencana menjadi lebih terkelola dengan baik. penting untuk memandang bahwa gender mainstreaming dalam pengurangan risiko bencana berarti mendorong perempuan agar memiliki posisi kunci dalam manajemen, kepemimpinan dan juga dalam pengambilan keputusan program penanganan bencana. juga harus diperhatikan, karena pengurangan risiko bencana adalah bagian integral dari pembangunan, maka gender mainstreaming dalam proses ini juga berarti upaya mendorong kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan masyarakat.²⁸

Deklarasi Beijing dan Rencana Aksinya dengan jelas mengakui bahwa degradasi lingkungan dan bencana mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan seringkali membawa dampak langsung yang lebih bagi perempuan. Sesi khusus ke 23 dari General Assembly pada tahun 2000 juga mengidentifikasi bencana alam sebagai tantangan terkini yang bisa mempengaruhi implementasi menyeluruh dari rencana aksi Beijing ini. Karenanya, dibutuhkan strategi untuk mengintegrasikan

²⁸ Dati Fatimah, *Gender Mainstreaming dalam Pengurangan Risiko Bencana*, Penulis adalah konsultan dan penulis lepas untuk isu-isu gender dalam anggaran, korupsi dan bencana, yang dipelajarinya dari berbagai interaksi dengan beragam komunitas perempuan di beberapa daerah. Laporan ini disusun sebagai catatan dengan mendasarkan pada proses mentoring “Peredaman Risiko Bencana” bagi mitra-mitra Hivos di Jawa Tengah dan DIY. Proses mentoring ini difasilitasi oleh tim fasilitator dari DREAM UPN bekerja sama dengan fasilitator dari 3 lembaga mitra Hivos yaitu Persepsi-Setara di Gantiwarno, FKISP di Kemalang –keduanya di wilayah kabupaten Klaten, dan RTND di Piyungan, Bantul, Jogjakarta. Tulisan yang sama pernah di muat di <http://bencana.net>.

Salah satu contoh pengabdian tersebut yaitu melalui sikap kesalihan sosial. Yaitu menjadi perempuan yang tangguh, yang mampu menjaga lingkungan, yang mampu bersiap-siaga sebelum terjadinya bencana, dan mampu menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak-anaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nahl ayat 97 yang merupakan janji Allah bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti kitab Allah SWT (Al-qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya, Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik dari pada amalnya.

Adapun kriteria dari kesalihan sosial perempuan yang tangguh bencana yaitu:

1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang bencana.
2. Adanya kelompok atau komunitas perempuan tangguh bencana
3. Adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
4. Masyarakat mampu menangani atau menanggulangi bencana
5. Adanya peraturan yang mampu menggerakkan kelompok perempuan tersebut
6. Adanya sikap keingintahuan masyarakat akan bencana.
7. Adanya sikap kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketika seorang wanita mampu dan mempunyai kriteria kesholihan sosial diatas, maka perempuan bukanlah menjadi hal yang remeh dan diremehkan lagi. bahkan perempuan bisa menjadi obatnya bagi kaum-kaum muslim yang lain, terutama perempuan yang sholih, yang salah satunya mampu dan mau melakukan kesholihan sosial. Ketika dunia ini dihuni oleh kebanyakan wanita sholihah, maka

